

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan daerah merupakan dana pemerintah daerah yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional setiap tahunnya. Pendapatan tersebut akan dibelanjakan untuk mencapai target atau sasaran yang telah ditetapkan pemerintah daerah di setiap awal tahun. Oleh karena itu, pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan dengan memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi agar dapat mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik.

Salah satu cara agar pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan baik adalah dengan menyusun dan melaporkan laporan pertanggungjawaban atas pendapatan dan belanja yang telah dilakukan secara tepat waktu. Laporan pertanggungjawaban juga harus disusun dengan jelas dan sesuai dengan ketentuan agar informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dapat dipercaya dan berkualitas. Laporan pertanggungjawaban yang berkualitas tersebut harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan amanat yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD dalam

bentuk laporan keuangan, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, terdiri atas tiga jenis yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan asli daerah juga terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Retribusi daerah merupakan penerimaan daerah atas pemberian suatu jasa pelayanan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi dan badan usaha. Salah satu entitas pemerintah daerah yang melakukan pengelolaan retribusi daerah adalah Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan Kota Palopo memiliki kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban atas pemungutan pendapatan daerah jenis retribusi jasa pelayanan pasar. Dinas ini juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan atas penerimaan retribusi tersebut dalam bentuk laporan keuangan kepada Pemerintah Daerah Kota Palopo.

Laporan Keuangan yang disusun oleh setiap entitas pemerintah harus berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adapun untuk sistem atau kebijakan akuntansi pada pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, bahwa Gubernur/Bupati/Walikota perlu untuk menetapkan peraturan daerah yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah di daerahnya masing-masing yang disesuaikan dengan pokok-pokok dalam

SAP. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menggunakan basis Cash Toward Accrual (CTA) yang disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah berbasis akrual. Oleh karena itu, seluruh entitas pemerintah diwajibkan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual termasuk pada sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah yang dipungut dan dikelola oleh oleh Dinas Perdagangan Kota Palopo, menjadi salah satu yang terbesar pada tahun 2019. Hal tersebut terbukti di mana pendapatan yang diperoleh Dinas tersebut mencapai peringkat ketiga di antara entitas satuan kerja pemerintah daerah lainnya. Menurut (Redaksi Palopopos, 2020), pendapatan daerah yang berasal dari Dinas Perdagangan juga menyumbang 2,94% dari total pendapatan asli daerah Kota Palopo tahun 2019. Berikut ini adalah tabel realisasi pendapatan asli daerah Kota Palopo tahun 2019.

Tabel I.1
Realisasi PAD Pada SKPD Kota Palopo

Satuan Kerja Perangkat Daerah	Anggaran (Dalam Satuan Rupiah)	Realisasi (Dalam Satuan Rupiah)	Persentase Terhadap PAD
Badan Pendapatan Daerah	40.943.200.000	41.146.360.141	82,57%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.500.000.000	3.611.557.708	7,25%

Dinas Perdagangan	8.978.071.140	1.463.166.000	2,94%
Dinas Kesehatan	2.625.975.884	1.189.623.407	2,39%
Dinas Perhubungan	862.000.000	869.260.000	1,74%
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	615.000.000	517.131.500	1,04%

Sumber: Diolah dari Redaksi Palopopos

Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk mengangkat topik terkait tinjauan terhadap akuntansi pendapatan di Dinas Perdagangan Kota Palopo. Tujuan dilakukannya tinjauan ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pendapatan pada Satuan Kerja tersebut di tahun 2019 telah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian penulis pada Dinas Perdagangan, hasilnya akan dimasukkan dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI AKUNTANSI PENDAPATAN PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, rumusan masalah yang diangkat penulis dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana prosedur penerimaan masing-masing pendapatan yang diterima oleh Dinas Perdagangan Kota Palopo?
2. Bagaimana pengakuan pendapatan pada Dinas Perdagangan Kota Palopo?
3. Bagaimana pengukuran pendapatan pada Dinas Perdagangan Kota Palopo?

4. Bagaimana penyajian dan pengungkapan pendapatan pada laporan keuangan Dinas Perdagangan Kota Palopo?
5. Apa yang menjadi permasalahan dan kendala dalam proses penerapan akuntansi pendapatan pada Dinas Perdagangan Kota Palopo?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui prosedur penerimaan masing-masing pendapatan yang diterima oleh Dinas Perdagangan Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui pengakuan pendapatan pada Dinas Perdagangan Kota Palopo.
3. Untuk mengetahui pengukuran pendapatan pada Dinas Perdagangan Kota Palopo.
4. Untuk mengetahui penyajian dan pengungkapan pendapatan pada laporan keuangan Dinas Perdagangan Kota Palopo.
5. Untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dialami dalam proses penerapan akuntansi pendapatan pada Dinas Perdagangan Kota Palopo.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan karya tulis tugas akhir ini terbatas pada penerapan akuntansi pendapatan pada Dinas Perdagangan Kota Palopo tahun 2019. Penulis menjabarkan kesesuaian antara data dan fakta terkait penerapan akuntansi pendapatan dan landasan teori terkait akuntansi pendapatan. Ruang lingkup pembahasan akuntansi

pendapatan meliputi definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan Dinas tersebut.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang dapat meningkatkan pengetahuan penulis terkait praktik penerapan akuntansi pendapatan. Karya tulis ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk menunjukkan hasil atas pembelajaran yang dilakukan dan mengaitkannya dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan.
2. Bagi Dinas Perdagangan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atas penerapan akuntansi pendapatan dan melakukan perbaikan atau penyesuaian terhadap penerapannya agar sesuai dengan ketentuan.
3. Bagi masyarakat, karya tulis ini dapat menjadi ilmu pengetahuan tambahan atas prosedur akuntansi di Dinas Perdagangan Kota Palopo. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi yang melakukan penelitian yang sejenis.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab, dengan tiap-tiap bab terdiri dari subbab dengan urutan yang disusun sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai jabaran latar belakang, rumusan masalah yang diangkat penulis, tujuan penelitian yang ingin dicapai, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan serta sistematika penulisan pada karya tulis tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat teori-teori dan ketentuan yang berlaku terkait dengan akuntansi pendapatan yang digunakan dalam menyusun karya tulis tugas akhir. Teori yang dimaksud yaitu mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi pendapatan. Penulis dalam melakukan tinjauan atas akuntansi pendapatan mengikuti peraturan pemerintah pusat, peraturan pemerintah daerah, ketentuan lainnya, dan sumber literatur yang berkaitan dengan implementasi akuntansi pendapatan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga berisi metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data terkait yang diperlukan dalam penyusunan karya tulis tugas akhir. Pada bab ini juga memaparkan mengenai profil umum dari Dinas Perdagangan Kota Palopo, seperti sejarah, tugas dan fungsi, serta struktur organisasinya. Kemudian diuraikan pula pembahasan atas hasil penelitian yang telah dilakukan penulis. Pembahasan hasil tersebut menjelaskan tinjauan atas penerapan praktik akuntansi pendapatan di Satuan Kerja tersebut dan data-data yang telah didapatkan seperti laporan keuangan

Dinas tersebut. Pembahasan berisi jawaban atas rumusan masalah yang ada sebelumnya dan tujuan penelitian yang akan dicapai.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab keempat ini, penulis menguraikan simpulan atas hasil tinjauan yang dilakukan di bab sebelumnya. Simpulan ini menjabarkan ulasan ringkas berdasarkan hasil yang telah ada. Bab ini juga berisi rekomendasi dari penulis berdasarkan jawaban yang telah didapatkan.